

MEMBANGUN GOVERNANCE MELALUI PENDIDIKAN MORALITAS

Mahmud MY, M.Pd

Abstract

Governance yang merupakan tata kelola pemerintahan mempunyai nilai strategis dalam melayani masyarakat. Melayani masyarakat tentu diperlukan strategi yang matang supaya masyarakat dilayani merasa nyaman disaat berurusan. Disamping strategi tentu budaya, budi pekerti (moral) juga tidak kalah pentingnya untuk dijadikan sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata kunci: Governance dan Moralitas.

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini istilah governance sangat santer dibicarakan oleh banyak orang, mulai dari kalangan birokrat, akademisi bahkan sampai ke dunia usaha (pengusaha). Hal ini tidak bisa disangkal tentang ke eksistensinya governance tersebut. Menurut Pratikno (2007) governance mempunyai banyak definisi tergantung dengan tujuan dan apa yang sedang dibahas. Malahan saat ini, governance bukan saja dibahas berkaitan dengan masalah pemerintahan bahkan sudah sampai ke domain-domain yang lain. Seperti di Amerika persoalan governance bukan lagi berkaitan dengan problema-problema yang berkaitan dengan pemerintahan saja, akan tetapi telah sampai pada perbincangan suatu hal yang berkaitan dengan penanggulangan sampah, dan begitu juga di Negara-negara eropa lainnya juga telah membicarakan governance yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi. Namun pada prinsipnya adalah bahwa governance itu adalah bagaimana sesuatu keadaan itu bisa menjadi baik dan lebih baik, sesuai dengan konsep utama daripada governance itu sendiri.

Mengenai konsep governance menurut beberapa pakar, memang mempunyai banyak pengertian Mengikuti Jon Pierre dan B. Guy Peters (2001:14) istilah governans ialah suatu istilah yang dapat diertikan dalam bidang atau disiplin ilmu yang berbeza, ertinya setiap disiplin ilmu akan memberikan definisi berbeza-beza bergantung kepada keperluan atau disiplin ilmu yang dimiliki. Rhoders (1997) menerangkan bahawa governans sebagai suatu payung konsep untuk keluasan gejala yang bervariasi sebagai jaringan kerja politik. Manakala Hood (1990) menjelaskan bahawa governans adalah sesuatu yang berhubungkait dengan pengurusan awam. Campbell (1991) dan Hollingsworth (1994) memberikan maksud governans sebagai usaha koordinasi beberapa sektor ekonomi. Pierre (2000) sendiri memberikan

deskripsi governans yang merupakan mitra hubungan antara masyarakat dengan swasta. Pierre dan Peters (2000) menyatakan bahawa terdapat empat rencana yang harus wujud dalam pelaksanaan governans iaitu: adanya hirarki, adanya pasar, adanya jaringan kerja, dan ada komuniti.

Rosenau Williams (1996) mengarahkan pengertian governans kepada kerjasama pemerintahan. Pengertian ini akhirnya ditutup oleh gambaran governans yang diberikan oleh *World Bank* dan IMF (Lefwich 1994) sebagai suatu reformasi tujuan tata pemerintahan.

Sejalan dengan keperluan dan kepentingan daripada suatu golongan, maka deskripsi daripada governance mempunyai perbezaan, perbezaan itu tentu tidak akan mempengaruhi daripada eksistensialis dari governance itu sendiri. Keberadaan governance memang telah banyak membawa suatu perkembangan dan perubahan, terutama di kalangan para ilmunan dan politisi yang selalu bergelut dengan masalah governance.

Eksistensi daripada governance telah dapat mencerahkan kalangan ilmunan dan ahli politik untuk lebih dapat bereaksi terutamasejalan dengan perkembangan demokratisasi. Menurutbahwa governance itu merupakan perkembangan daripada demokrasi. Hal ini tidak bias kita napikan, karena demokratisasi itu sendiri telah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bebas berpendapat, berbuat tentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perkembangan demokratisasi telah berdampak terhadap system daripada suatu Negara terutama Negara Indonesia. Buah daripada demokratisasi itu telah melahirkan berbagai implikasi terhadap wajah bangsa Indonesia yang selama ini lebih mengamalkan system pemerintahan yang sentralistik bahkan sudah masuk ke dalam system otoriter di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Kebebasan yang di praktekkan oleh rakyat Indoensia, dapat kita lihat beberapa tahun ini. Menjamurnya demonstrasi di sana sini, yang kadang kala suatu hal yang tidak perlu di demo, di demokan oleh masyarakat, suatu hal yang sepele menjadi hal yang serius, inilah diantaranya wajah dan buah daripada demokrasi itu sendiri. Demonstrasi yang terjadi di Indoensia tidak jarang yang tidak menelan korban, baik material maupun moral. Bahkan demonstrasi-demonstrasi telah banyak yang mengakibatkan terhadinya degradasi Moral akibat dari melampiasikan kemarahannya. Kemarahan tersebut lebih banyak didasarkan oleh ketidak puasan masyarkat terhadap pemerintah. Hal ini dapat dicontohkan terhadap pendemonstrasi para ibu-ibu pedagang kaki lima yang tidak malu-malu lagi membuka bajunya karena ketidakpuasan terhadap tempat mencari sesuap nasi di bongkar oleh aparat, ada juga di medan para pekerja sawit yang juga hamper sama yang membuka bajunya untuk berdemo. Belum lagi para pendemo yang merusak, membakar poto, mencoreng dan sebagainya. Inilah yang menurut saya kesemuanya ini disebabkan oleh ada kemerosotan moral di tengah-tengah masyarakat. Untuk

itu dalam pembahasan selanjutnya saya ingin untuk membahas tentang governans dan kemerosotan Moral Bnagsa Indoensia.

B. PENGERTIAN GOVERNANCE

Semenjak governance di laungkan ke permukaan, maka bunyi governance bergema di sating sudut, dan seolah-olah tidak ada rasa capeknya untuk I dengungkan. Malahan ada yang berpendapat bahwa governance akan dating masa kejenuhannya. Tapi sampai hari ini kata-kata itu seolah-olah belum terbukti. Governance masih tetap menjadi buah biri dan pembicaraan yang panas hamper di setiap lapisan masyarakat. Governance mempunyai banyak pengertian dan mempunyai banyak makna sesuai dengan apa yang sedang di bicarakan. Governance mempunyai pengertian yang luas (*Wide of meaning*), tergantung dari sudut mana ia dipandang.

Bank Dunia (1989), misalnya, mendefinisikan *governance* sebagai tindakan pemegang kekuasaan untuk mengelola urusan-urusan nasional. Governans dapat juga diertikan sebagai pengelolaan struktur rezim dengan sebuah pandangan untuk memperkuat legitimasi penyelenggaraan kekuasaan di mata kehidupan publik (G. Heyden 19920). Legitimasi merupakan variabel tergantung yang dihasilkan oleh governans yang efektif. Governans dan pembuatan keputusan adalah dua entiti yang berbeda namun dalam praktik keduanya saling mempengaruhi. Perbedaan mendasarnya adalah bahwa governans dapat disebut sebagai polisi besar (*metapolicies*), atau apa yang disebut oleh Kiser dan Ostrom (1982) sebagai pilihan-pilihan konstitusional.

Sejumlah agen pembangunan internasional ikut mengelaborasi sebuah visi governans, yang secara langsung ditujukan pada isu akuntabiliti politik. Ford Foundation (1990), misalnya, sejak dekade 1980-an telah menjadi perintis program governans yang berakar pada sebuah keyakinan bahawa pemerintahan yang efektif tergantung pada legitimasi yang bersandar pada partisipasi, keterbukaan dan akuntabiliti. Ford Foundation secara terbuka mendorong penguatan institusi-institusi demokrasi, peningkatan partisipasi kelompok-kelompok marginal, dan membuat perkhidmatan awam tanggap pada keperluan lapisan masyarakat miskin. Lembaga ini percaya bahawa pemerintah harus dikontrol oleh warga negara yang aktif dan terorganisir.

Goran Hyden (1992) secara komprehensif mengidentifikasi 3 dimensi besar dalam konteks governans: dimensi aktor, dimensi struktural dan dimensi empirik. Dimensi aktor mencakup kekuasaan, kewenangan, resiprositas dan pertukaran. Dimensi struktural mencakup elemen-elemen seperti ketulusan (*compliance*), trust (kepercayaan), akuntabiliti dan inovasi. Interaksi antara dimensi aktor dan dimensi struktural itu menghasilkan apa yang disebut Hyden sebagai bidang governans. Bidang governans, menurut Hyden, dihasilkan oleh relasi politik antara resiprositi dan kewenangan serta

antara kepercayaan dan akuntabiliti. Tentu sahaja relasi politik itu melibatkan antara penyelenggara kekuasaan (pemerintahan) dengan aktor-aktor sosial di luar negara yang begitu luas. Dimensi empirik governans mencakup tiga elemen utama: pengaruh warga negara; resiprositi sosial serta kepemimpinan yang responsif dan bertanggungjawab. Pengaruh warga negara diukur dari tingkat partisipasi politik, perangkat artikulasi dan metode akuntabiliti publik. Kepemimpinan yang responsif dan bertanggungjawab menunjuk pada sikap pemimpin politik pada peranannya sebagai kepercayaan publik. Indikatornya mencakup: tingkat penghormatan pemimpin pada publik; tingkat keterbukaan pembuatan polisi publik dan tingkat ketaatan pada *rule of law*. Sedangkan resiprositas sosial menunjuk pada derajat kesetaraan politik dalam masyarakat, tingkat toleransi antar kelompok dan tingkat keterbukaan dalam organisasi-organisasi sosial.

Lembaga Pengurusan Negara (LAN, 2000) mendefinisikan governans sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergian" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Pada tataran ini, governans berorientasi kepada dua perkara utama, iaitu: *Pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, governans lebih mengarah kepada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya; *Kedua*, Pemerintahan yang berfungsi secara ideal iaitu secara efektif dan efisien dalam melaksanakan usaha mencapai matlamat pembangunan. Dalam konteks ini, governans bergantung pada sejauhmana struktur serta mekanisme politik dan pengurusan berfungsi secara efektif dan efisien.

United Nations merumuskan indikator governans yang meliputi: (1) kemampuan, iaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan polisi dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi awam yang efektif dan responsif; (2) akauntabiliti dalam kegiatan pemerintahan dan ketelusan dalam pengambilan keputusan; (3) penyertaan dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi dari awam dan dari swasta; (4) perhatian terhadap kesamarataan dan kemiskinan; dan (5) komitmen terhadap polisi ekonomi yang berorientasi kepada perniagaan (Pasaraya).

Mengikut Jon Pierre dan B. Guy Peters (2001:14) istilah governans ialah suatu istilah yang dapat diertikan dalam bidang atau disiplin ilmu yang berbeza, ertinya setiap disiplin ilmu akan memberikan definisi berbeza-beza bergantung kepada keperluan atau disiplin ilmu yang dimiliki. Rhodens (1997) menerangkan bahawa governans sebagai suatu payung konsep untuk keluasan gejala yang bervariasi sebagai jaringan kerja politik. Manakala Hood (1990) menjelaskan bahawa governans adalah sesuatu yang berhubungkait dengan pengurusan awam. Campbell (1991) dan Hollingsworth (1994)

memberikan maksud *governans* sebagai usaha koordinasi beberapa sektor ekonomi. Pierre (2000) sendiri memberikan deskripsi *governans* yang merupakan mitra hubungan antara masyarakat dengan swasta. Pierre dan Peters (2000) menyatakan bahawa terdapat empat rencana yang harus wujud dalam pelaksanaan *governans* iaitu: adanya hirarki, adanya pasar, adanya jaringan kerja, dan ada komuniti. Rosenau Williams (1996) mengarahkan pengertian *governans* kepada kerjasama pemerintahan. Pengertian ini akhirnya ditutup oleh gambaran *governans* yang diberikan oleh *World Bank* dan IMF (Lefwich 1994) sebagai suatu reformasi tujuan tata pemerintahan.

C. PENGERTIAN MORAL

Secara kebahasaan perkataan moral berasal dari ungkapan bahasa latin *mores* yang merupakan bentuk jamak dari perkataan *mos* yang berarti adapt kebiasaan. Dalam kamus Umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat dan perangai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Moral dalam istilah dipahami juga sebagai (1) prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk. (2) kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah. (3) ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik. Moral juga dapat disama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Dr. Hj. Sri Mulyati, MA).

D. HUBUNGKAIT GOVERNANCE DAN MORALITAS

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas tadi, bahwa diantara tujuan *governance* itu adalah ingin menjadikan pemerintahan menjadi lebih baik, dengan tidak menghilangkan daripada identitas daripada pemerintahan itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta akuntabel merupakan ciri khas daripada *good governance*. *Good governance* yang mempunyai banyak label mulai dari bentuk transparansi sampai pada efisiensi merupakan prinsip *governance* yang tidak bisa diabaikan. Dan itu merupakan jati diri daripada pelaksanaan *good governance*.

Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan jabatan, adanya korupsi, lemahnya perhatian terhadap pelayanan public, merupakan bentuk dari tidak terselenggaranya *good governance*. Menurut beberapa pakar, hal tersebut banyak disebabkan oleh lemahnya moralitas seseorang. Seperti terjadi korupsi. Korupsi yang merupakan disamping merugikan Negara juga merugikan banyak orang. Terjadinya korupsi lebih banyak disebabkan oleh dangkalnya moral seseorang. Sebab kalau moralnya baik, maka kemungkinan besar terjadinya korupsi dapat dihindari.

E. KESIMPULAN

Sebagian besar para ilmuwan dan tokoh masyarakat bangsa Indonesia, seperti Mahfud MD, Din Syamsuddin, dengan lantangnya mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh rendahnya moralitas individu anak bangsa itu sendiri. Disisi lain budayawan Ainun Najib juga mengatakan bahwa rendahnya moral akan mengakibatkan banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangatlah penting, sebab moral merupakan suatu variabel yang dapat mempengaruhi diri seseorang secara langsung. Seseorang dikatakan bermoral apabila seseorang tersebut mampu untuk menahan dan mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Katakanlah melakukan asusila, perlakuan pelecehan seksualitas, korupsi dan termasuk penyalahgunaan jabatan.

Governance yang menurut pengertian secara luas, merupakan pemangku jabatan dalam pemerintahan yang sehari-hari bertugas untuk melayani dan mengayomi masyarakat, tentu dituntut untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk melakukan pelayanan yang baik dan maksimal akan memerlukan etika atau moral yang baik, sebab secara tidak langsung moral itu akan nampak setelah melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya dengan kata lain antara yang melayani dengan yang dilayani.

F. REFERENSI

- Bryson, J.M. (2001). *Perencanaan strategis bagi organisasi sosial*. (Terjemahan M. Miftahuddin). London: Paul Chapman Publishing Ltd. (Buku asli diterbitkan tahun 1988).
- Bush, T., & Coleman, M. (2000). *Leadership and strategic management in education*. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
- Stephen P.Robbins (2003). *Organization Behavior*, Tenth Edition, Upper Saddle River, New Jersey 07458..
- Sudjana, (2004), *Manajemen Program Pendidikan*, Falah Production Bandung
- Thurston/Coombs S.F. (1993), *Educational Governance And Administration*, Englewood Chiffs, New Jersey.